

Peran Intelijen Strategis Terhadap Potensi Bencana Sosial Berbasis Konflik Sara di Indonesia

¹Junior Ternama Siahaan, ²Halomoan FS Alexandra, ³Parluhutan Sagala,
⁴Rachmat Setiawibawa, ⁵Arifuddin Uksan

Program Studi S2 Damai Dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia¹²³⁴⁵
e-mail: 1junior.siahaan@kn.idu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran intelijen strategis dalam mendeteksi dan mencegah potensi bencana sosial berbasis konflik SARA di Indonesia serta merumuskan strategi penguatan sistem peringatan dini berbasis analisis intelijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku relevan yang dianalisis secara induktif, dengan fokus pada makna sosial dan konteks konflik SARA dalam kerangka penanggulangan bencana sosial. Penelitian ini menemukan bahwa intelijen strategis mampu memetakan gejala awal konflik SARA melalui analisis ujaran kebencian, polarisasi identitas, dan mobilisasi massa. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan SDM, teknologi, serta koordinasi lintas lembaga. Kasus di Papua dan konflik pasca pemilu menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam sistem deteksi dini.

Kata kunci: *Bencana Sosial, Intelijen, SARA*

Abstract

This study will analyse the effectiveness of strategic intelligence in detecting and preventing potential social disasters based on SARA conflicts in Indonesia. It will also formulate strategies for strengthening an early warning system based on intelligence analysis. This study uses a descriptive qualitative approach through literature review. Data sources were obtained from scientific journals and relevant books. These were analysed inductively, with a focus on the social meaning and context of SARA conflicts within the framework of social disaster management. This study definitively found that strategic intelligence can map the early signs of SARA conflicts through the analysis of hate speech, identity polarisation, and mass mobilisation. However, its effectiveness is still constrained by limitations in human resources, technology, and inter-agency coordination. Cases in Papua and post-election conflicts show the importance of technology integration and community participation in early detection systems.

Keywords: *Social Disaster, Intelligence, SARA*



Pendahuluan

This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Bencana sosial berbasis konflik SARA semakin kompleks di era globalisasi, dipicu oleh polarisasi identitas, ketimpangan sosial, dan penyebaran misinformasi melalui media digital). Studi terbaru menunjukkan bahwa dinamika konflik SARA di negara multikultural seperti Indonesia sering terkait dengan kompetisi sumber daya, politisasi identitas, dan kegagalan sistem deteksi dini. Intelijen strategis diperlukan untuk memetakan akar konflik,

seperti radikalisme kelompok atau ketidakadilan struktural, yang berpotensi memicu kekerasan horizontal. Konflik SARA, seperti kasus kekerasan antar-etnis atau ketegangan keagamaan di wilayah tertentu, tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang luas. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa bencana tidak hanya mencakup fenomena alam, tetapi juga bencana non-alam dan sosial, termasuk konflik yang mengarah pada kerusakan massif. Implementasi penanggulangan bencana sosial berbasis konflik SARA masih cenderung reaktif, minim pendekatan preventif dan kurang terintegrasi dengan sistem intelijen strategis.

Intelijen strategis berperan penting dalam mengidentifikasi potensi konflik SARA melalui pendekatan analisis multidimensi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menekankan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat, dan koordinasi yang efektif. Namun, pendekatan konvensional sering kali kurang mampu mengantisipasi eskalasi konflik karena keterbatasan dalam kapasitas analisis data *real-time*, seperti dinamika ujaran kebencian di media sosial atau mobilisasi kelompok rentan terhadap radikalisme. Padahal, sistem peringatan dini yang terintegrasi sangat penting untuk meminimalisasi risiko bencana. Dalam konteks ini, analisis intelijen strategis diperlukan untuk menggabungkan metode kualitatif, seperti pemetaan aktor konflik, dan kuantitatif, seperti analisis big data digital, guna mengidentifikasi indikator awal konflik, seperti peningkatan tensi sosial di daerah rawan atau fragmentasi kohesi masyarakat.

Intelijen strategis memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi potensi bencana sosial sebelum eskalasi terjadi. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keamanan nasional, meliputi peringatan dini, deteksi dini, dan cegah dini terhadap setiap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Fungsi utama BIN mencakup kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menghasilkan produk intelijen strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional. Dalam konteks potensi bencana sosial berbasis konflik SARA di Indonesia, BIN berperan penting sebagai lini terdepan dalam mengidentifikasi dan menganalisis indikasi awal terjadinya konflik, mengantisipasi penyebaran disinformasi yang memicu polarisasi sosial, serta memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Pada tataran pemerintahan tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, terdapat Komite Intelijen Daerah (Kominda) yang menjadi wadah koordinasi intelijen di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, 2018). Kominda berperan sebagai forum strategis yang menghimpun, mengolah, dan menganalisis informasi dari berbagai unsur intelijen dan instansi terkait di daerah guna mendeteksi secara dini potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap stabilitas pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam konteks kewaspadaan nasional, Kominda menjadi instrumen penting bagi kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif terhadap isu-isu strategis, termasuk konflik sosial, radikalisme, separatisme, serta potensi kerawanan lainnya, guna menjaga keutuhan NKRI dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui pengumpulan dan analisis informasi yang sistematis, intelijen dapat memberikan peringatan dini kepada pemangku kepentingan untuk mengambil langkah preventif. Sebagai contoh, dalam konteks konflik separatis di Papua, menekankan pentingnya integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dalam analisis data intelijen untuk mengantisipasi dan merespons dinamika konflik secara efektif (Maharani et al., 2023).

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur penanganan konflik sosial, seperti Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Maksum & Muhammadiyah Yogyakarta). Kolaborasi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat di Palembang berhasil mencegah terjadinya konflik SARA, sehingga menciptakan kondisi yang stabil tanpa insiden konflik. Kendati demikian, fokus utama penelitian tersebut terletak pada keterlibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, sementara aspek peran intelijen strategis dalam upaya deteksi dini terhadap potensi konflik SARA belum diulas secara komprehensif (Habib et al., 2023).

Implementasi intelijen strategis dalam konteks konflik SARA menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kompleksitas dinamika sosial. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons terhadap potensi bencana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas intelijen strategis dalam mendeteksi dan mencegah konflik sosial berbasis SARA di Indonesia, fondasi dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang tepat sasaran, guna menjaga stabilitas nasional, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah disintegrasi bangsa di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks dan terus berkembang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara yang ilmiah. Analisis data dilakukan secara induktif, lebih fokus pada makna daripada pada generalisasi, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan numerik dalam proses pengumpulan datanya. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, serta buku digital (Vitra Varecha et al., 2024).

Temuan dan Pembahasan

Penyebaran ujaran kebencian di *platform digital* telah diidentifikasi sebagai indikator kunci ancaman konflik SARA di Indonesia. Konten bermuatan prasangka terhadap kelompok tertentu tidak hanya berpotensi memicu ketegangan antarkomunitas, tetapi juga memperdalam jurang perpecahan sosial. Peran media sosial dalam mempercepat diseminasi isu sensitif SARA semakin memperumit dinamika interaksi masyarakat. Identifikasi awal terhadap konten provokatif melalui metode intelijen strategis menjadi langkah penting untuk mencegah eskalasi konflik berbasis identitas (Najib et al., 2023).

Mobilisasi massa yang didorong oleh sentimen SARA sering kali menjadi pemicu kerusuhan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Aksi-aksi demonstrasi yang awalnya bersifat damai dapat berubah menjadi anarkis ketika dipicu oleh provokasi yang mengandung unsur SARA. Mobilisasi massa pasca pemilu berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, peran intelijen strategis dalam memantau dan menganalisis potensi mobilisasi massa menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik (Pontjo Soediantoko, 2024).

Keretakan sosial yang tercermin dari rapuhnya ikatan antar kelompok masyarakat, menjadi penanda krusial potensi konflik berbasis SARA. Ketika perbedaan identitas gagal diatur secara konstruktif, hal ini dapat memicu pengelompokan segregatif dan memperdalam kesenjangan antarkomunitas. Eskalasi politik identitas berisiko memperburuk situasi ini jika tidak diiringi strategi rekonsiliasi yang sistematis. Melalui pendekatan intelijen strategis, wilayah-wilayah dengan tingkat keretakan sosial akut dapat dipetakan, sehingga memungkinkan desain intervensi berbasis data untuk memulihkan kohesi sosial.

Polarisasi identitas khususnya yang terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), berpotensi mempercepat ketegangan sosial. Semakin menguatnya perpecahan antarkelompok masyarakat akan menurunkan tingkat toleransi dan meningkatkan risiko gesekan horizontal. Narasi provokatif yang menysar kelompok tertentu dapat memperlebar jurang perbedaan identitas serta memicu ketegangan massal. Di sinilah peran intelijen strategis menjadi vital dalam mengidentifikasi pola perpecahan melalui analisis data dan model prediktif guna mencegah meluasnya konflik (Suganda et al., 2025).

Analisis intelijen strategis dalam upaya mitigasi konflik SARA menjadi semakin penting di era digital saat ini. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, intelijen strategis dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi konflik. Pentingnya pendekatan intelijen strategis dalam memberikan perlindungan di ruang siber, khususnya dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat yang dapat memicu konflik SARA. Penguatan kapasitas intelijen strategis menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik sosial berbasis SARA di Indonesia (Samad & Persadha, 2022).

Intelijen strategis dalam kerangka Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sejalan dengan prinsip pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang diamanatkan oleh *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR). Namun, tantangan utama terletak pada harmonisasi kebijakan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lokal. Dengan memperkuat kerangka hukum dan operasional intelijen strategis, Indonesia dapat mengoptimalkan mitigasi bencana sosial secara holistik, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk melindungi hak hidup, harkat, dan martabat masyarakat.

Intelijen strategis memiliki peran krusial dalam mendeteksi dini potensi konflik SARA di Indonesia. Melalui analisis situasi, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan pemantauan media sosial, aparat intelijen dapat mengidentifikasi gejala awal konflik. Misalnya, di Papua, intelijen melakukan analisis mendalam terhadap akar penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, dan potensi eskalasi konflik. Mereka juga memantau perkembangan situasi konflik secara terus-menerus dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif atau responsif dalam mengatasi konflik (Lettu et al., 2024).

Di wilayah Papua, peran intelijen sangat penting dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai kelompok pemberontak dan potensi ancaman lainnya yang berkaitan dengan insurgensi. Informasi yang tepat dan terkini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Demikian pula, dalam konteks Pemilu 2019, intelijen strategis berperan dalam memantau dinamika politik dan potensi konflik yang dapat muncul akibat polarisasi politik dan penyebaran disinformasi. Deteksi dini terhadap potensi konflik ini memungkinkan

pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil tindakan preventif guna menjaga stabilitas nasional.

Fungsi utama intelijen strategis mencakup pengumpulan data, analisis informasi, dan penyampaian hasil analisis kepada pengambil kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemantauan media sosial, wawancara dengan informan, dan observasi langsung di lapangan. Analisis informasi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat mengarah pada konflik SARA. Hasil analisis kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

Kelebihan intelijen strategis terletak pada kemampuannya dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Di wilayah seperti Papua, kurangnya personel intelijen yang kompeten dan terbatasnya akses terhadap teknologi canggih menjadi hambatan dalam pelaksanaan operasi intelijen yang efektif.

Implementasi intelijen strategis di Indonesia menghadapi hambatan struktural, seperti birokrasi yang kompleks dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi dapat menghambat efektivitas operasi intelijen. Hal ini memerlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan sinergi antar lembaga untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap potensi konflik SARA (Setyasih, 2023).

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih *Human Intelligence* (HUMINT) dan teknologi yang memadai menjadi tantangan signifikan dalam implementasi intelijen strategis. Kurangnya personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika lokal dan kemampuan analisis intelijen yang tajam dapat mengurangi efektivitas operasi intelijen. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan teknologi canggih, seperti perangkat pengawasan elektronik dan komunikasi terenkripsi, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas intelijen (Arbani, 2024).

Dalam konteks pencegahan konflik SARA di tingkat daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, diperlukan kolaborasi antara elemen intelijen dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan organisasi masyarakat lainnya memegang peranan strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial. Intelijen strategis, yang bekerja melalui instrumen seperti Kominda, dapat memperoleh data lapangan yang lebih akurat dan kontekstual melalui sinergi dengan FKUB yang memiliki akar sosial dan keagamaan yang kuat di masyarakat. FKUB, dengan jaringannya yang lintas agama, mampu mengidentifikasi potensi gesekan antarumat beragama sejak dini dan menjadi kanal efektif untuk meredam provokasi maupun penyebaran ujaran kebencian. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan tokoh adat juga turut menjadi mitra kunci dalam mendeteksi dinamika sosial dan membangun komunikasi horizontal di akar rumput. Kolaborasi ini memperkuat fungsi deteksi dan cegah dini intelijen strategis secara partisipatif, di mana informasi dan respons cepat dapat dimobilisasi secara kolektif sebelum potensi konflik membesar menjadi bencana sosial. Dengan demikian, sinergi yang terbangun antara aparat intelijen, FKUB, dan elemen masyarakat sipil menjadi pondasi penting bagi ketahanan sosial dan stabilitas daerah dalam kerangka kewaspadaan nasional.

Kesimpulan

Intelijen strategis memainkan peran vital dalam deteksi dini potensi bencana sosial berbasis konflik SARA di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan struktural, teknis, dan sosial, dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, intelijen strategis dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah terjadinya konflik sosial yang meluas. Hal yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan peran intelijen strategis dalam pencegahan dini terjadinya bencana sosial sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Intelijen
Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam lembaga intelijen untuk memungkinkan analisis data real-time dan respons yang lebih cepat terhadap potensi konflik. Hal ini mencakup pelatihan khusus dan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi.
2. Koordinasi Lintas Lembaga
Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara lembaga penanggulangan bencana, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan respons yang terintegrasi terhadap potensi konflik SARA.
3. Pendekatan Partisipatif dan Teknologi Digital
Mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam sistem peringatan dini dan memanfaatkan teknologi digital, seperti *platform* pelaporan daring dan analisis media sosial, dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi potensi konflik.
4. Reformasi Kebijakan Keamanan Nasional
Kebijakan keamanan nasional harus disesuaikan untuk lebih proaktif dalam mengantisipasi konflik sosial, dengan menekankan pada pencegahan dan mitigasi risiko melalui pendekatan intelijen strategis yang holistik.

Referensi

- [1]. Arbani, M. (2024). Tantangan dan Realisasi Intelijen dan Keamanan Nasional pada Era 5. *Advances In Social Humanities Research*, 2(2), 213–220. <https://doi.org/10.46799/ADV.V2I2.185>
- [2]. Habib, R., Nugraha, H., Fs, A., Adriyanto, A., Juni, H., & Saragih, R. (2023). Sinergi Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Konflik Sara guna Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Palembang. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 775–799. <https://doi.org/10.52851/CAKRAWALA.V6I2.277>
- [3]. Lettu, A., Nur, A., Syamiajaya, S., Tr, H., Sus, K., Mhd, D., Halkis, M. H., Arm, K., Dohamid, A. G., Sos, S., & Gibran, M. N. (2024). Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 225–238. <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6091>
- [4]. Maharani, T. D., Sarjito, A., Marnani, C. S., Almubaroq, H. Z., & Falefi, R. (2023). Separatist and Terrorist Movements in Papua: The Challenges of Social Disaster Management and the Important Role of Human-Made Disaster Intelligence. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang*

- Mengedepankan Identity, Nasionalism Dan Integrity*, 9(3), 443–457. <https://doi.org/10.33172/IP.V9I3.14659>
- [5]. Maksum, A., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2020). Analisis Tata Kelola Keamanan Indonesia Masa Kini: Studi Kasus UU No. 34/2004, UU No. 2/2002, UU No. 7/20121. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 131–160. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1584>
- [6]. Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). PERANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMINIMALISASI KONFLIK ISU SARA DI INDONESIA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127–136. <https://doi.org/10.24198/JKPK.V5I2.51017>
- [7]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129345/permendagri-no-2-tahun-2018>
- [8]. Pontjo Soediantoko. (2024). Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- [9]. Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2022). PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT. *Kajian*, 27(1), 31–42. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V27I1.3588>
- [10]. Setyasih, E. T. (2023). REFORMASI BIROKRASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62. <https://doi.org/10.54783/JK.V6I1.671>
- [11]. Suganda, A. M., Salya, S., & Widya, A. V. R. (2025). ANALISIS PROPAGANDA ANTI TIONGKOK SEBAGAI ANTISIPASI POTENSI KONFLIK SOSIAL PASCA MENINGKATNYA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-TIONGKOK. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 7(1), 22–35. <https://doi.org/10.54783/IIN.V7I1.1247>
- [12]. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>
- [13]. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39236>
- [14]. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- [15]. Vitra Varecha, P., Triutomo, S., Widodo, P., Prodi Manajemen Bencana, W., & Keamanan, F. (2024). IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTELIJEN KEBENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5), 1960–1967. <https://doi.org/10.31604/IIPS.V11I5.2024.1960-1967>